

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Kinerja keuangan DPKAD Bukittinggi apabila dilihat dari rasio efektivitas Penerimaan PAD secara keseluruhan dapat dikatakan sudah efektif dengan rata-rata efektivitas berada antara 90%-100% tepatnya sebesar 92,42%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan efektivitas sebesar 101,71%. Sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dengan efektivitas sebesar 76,86%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam efektivitas kinerja keuangan Kota Bukittinggi selama lima tahun ini.
2. Kinerja keuangan DPKAD Bukittinggi apabila dilihat dari rasio pajak daerah terhadap PAD secara garis besar dapat dikatakan sudah dalam kategori baik dengan rata-rata rasio sebesar 41,44%. Hanya pada tahun 2010 rasio pajak terhadap PAD Kota Bukittinggi mendapat kategori cukup baik yaitu dengan rasio 35,74%. Dari tahun 2011 sampai dengan 2014, Rasio pajak terhadap PAD kota Bukittinggi selalu di atas angka 40% dengan kategori baik walaupun terjadi fluktuasi dalam nilai rasionya.
3. Apabila dilihat dari rasio tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi selama periode 2010 sampai dengan 2014, hasil penelitian menunjukkan nilai yang kurang memuaskan. Selama periode lima tahun

tersebut, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi selalu dalam kriteria sangat rendah yaitu berkisar antar 10,60% hingga 11,69% dengan rata-rata 11,21%.

4. Hasil analisis *Trend* menunjukkan kecenderungan perkembangan yang cukup baik bagi masing-masing rasio keuangan DPKAD Kota Bukittinggi sebagai tolak ukur untuk tahun-tahun berikutnya. Analisis trend untuk rasio efektivitas penerimaan PAD Kota Bukittinggi memberikan gambaran adanya kecenderungan peningkatan efektivitas sebesar 5,96% setiap tahunnya. Sehingga dapat diramalkan rasio efektivitas untuk tahun 2015 adalah sebesar 110,31% dan pada tahun 2016 sebesar 116,27%.

Untuk rasio pajak daerah terhadap PAD, juga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 1,58% setiap tahunnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa rasio pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi pada tahun 2015 akan cenderung meningkat menjadi 46,19% dan pada tahun 2016 menjadi 47,77%.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi juga menunjukkan kecenderungan perkembangan setiap tahunnya. Hasil peramalan dengan analisis trend memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi akan cenderung meningkat menjadi 11,87% dan 12,09% pada tahun 2016 nanti.

## 5.2.Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas, peneliti menemukan masih banyak informasi yang dapat digali dari data yang ada dan masih banyak rasio yang dapat dipakai dalam menilai kinerja keuangan daerah. Dari hasil penelitian, dapat

diketahui juga bahwa kinerja keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai cara baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Maka peneliti memberi saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya.

Selain itu Pemerintah Daerah harus berusaha mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial dalam rangka mengurangi ketergantungan Daerah terhadap bantuan dari pihak pusat maupun provinsi.

Pemerintah dan atau pihak terkait juga sebaiknya merevisi dasar acuan dalam menetapkan anggaran penerimaan daerah sehingga

anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi dengan lebih baik. Pemerintah dapat menggunakan analisis Trend dalam memproyeksikan penerimaan daerah sebagai dasar acuan penetapan anggaran, sehingga anggaran penerimaan yang disusun dapat lebih mendekati realisasi.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menerapkan analisis *time series* pada setiap sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam menilai potensi penerimaan daerah di waktu yang akan datang. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini sehingga hasil yang didapat juga dapat bermanfaat dalam lingkup yang lebih besar.

## 3. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sudah berupaya dengan baik dalam melaksanakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya. Maka dari itu diharapkan bagi masyarakat daerah untuk berperan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Masyarakat daerah sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap perekonomian daerah sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan daerah seperti

melalaikan kewajiban perpajakan atau bahkan upaya menghindari kewajiban perpajakannya.

Peran serta masyarakat ini juga dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan perekonomian pemerintah daerah. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk mengawasi dan melaporkan apabila melihat atau mengetahui adanya praktek-praktek dalam pengelolaan penerimaan daerah yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan pemerintah daerah. Apabila telah terdapat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka perekonomian daerah dapat terlaksana dengan lebih terstruktur yang secara langsung akan berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik.

